

Judul : TNI Ikut beri pembekalan, penerima beasiswa wajib cinta tanah air
Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

TNI Ikut Beri Pembekalan Penerima Beasiswa Wajib Cinta Tanah Air

ANGGOTA Komisi XI DPR M Hasanuddin Wahid tidak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah itu untuk menaikkan patriotisme mahasiswa serta pelajar. Upaya ini efektif asal melanggar aturan dan berfungsi optimal bagi seluruh anak bangsa.

Hasanuddin mengatakan, nilai cinta Tanah Air harus ditanamkan kepada para penerima beasiswa LPDP sejak awal. Itu wajib ditekankan khususnya bagi mereka yang akan segera melanjutkan studi ke luar negeri. Semangat patriotisme merupakan landasan utama dalam menjaga identitas nasional saat menempuh pendidikan global.

Mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, kata dia, diharapkan tetap mampu membawa nilai patriotisme serta cinta NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selama kegiatan pembekalan oleh TNI ditopang dengan latar belakang rasional serta tujuan jelas tanpa melanggar peraturan, tidak ada persoalan berarti yang harus diperdebatkan.

Pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP, sambungnya, diprediksi tidak akan menguras anggaran negara dalam jumlah yang banyak. Pengeluaran biaya untuk menciptakan rasa cinta Tanah Air serta bangsa itu dianggap wajar karena tujuannya sangat jelas. "Kegiatan itu dipastikan bukan sekadar ajang hura-hura ataupun ego sektoral," ujarnya. Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Komisi X DPR

Lalu Hadrian menambahkan, pelibatan TNI dalam program pembekalan calon penerima LPDP perlu dilihat secara sangat hati-hati. LPDP adalah instrumen pendanaan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM sipil lewat beasiswa. Fokus utamanya tetap pada riset serta pengembangan keilmuan mahasiswa.

Pelibatan TNI bisa dipahami jika dimaksudkan dalam konteks penguatan kapasitas tertentu seperti disiplin atau kepemimpinan di bidang strategis pertahanan. Syaratnya adalah proporsinya tetap jelas serta tidak menggeser tujuan utama LPDP. Lembaga itu harus tetap fokus dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola dana pendidikan.

Sisi fungsi perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar lembaga negara dalam pelaksanaan program itu. Makanya, LPDP harus menjaga prinsip agar kebijakannya tetap profesional serta inklusif. "Orientasi utama pendidikan harus tetap berjalan sesuai tugas masing-masing instansi tanpa mengabaikan aspek profesionalitas yang ada," katanya.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M Lukmanul Hakim menyebut, kegiatan persiapan keberangkatan semacam ini bukan hal baru. LPDP secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan awal itu bagi penerima beasiswa sebelum studi. Program itu dilaksanakan sejak awal beasiswa digulirkan guna memastikan kesiapan para mahasiswa. ■ PYB